

Rabu, 16 Agustus 2023

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Kementerian BUMN Tunggu Hasil Audit BPKP
Nama Media	Analisa Daily
Newstrend	Kasus Korupsi PT Jiwasraya
Halaman/URL	Pg9
Tanggal Berita	2023-08-15
Sentimen	Positive

Masalah Dapen BUMN Kementerian BUMN Tunggu Hasil Audit BPKP

Jakarta, (Analisa)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal dana pensiun (dapen) BUMN.

'Dan pensiun ini kami sudah petakan, sudah selesai, dan sedang diaudit BPKP baru setelah diaudit kami bisa memetakan mana yang fraud, yang korupsi, mana yang mismanagement. Ini ada dua ya, jangan salah. Ini yang kami dorong nanti ke Kejaksaan,' kata Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara Forum Sinergi BUMN-Swasta di Jakarta, Senin (14/8).

Dia mengatakan rencana pelaporan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) soal dapen tersebut seharusnya dilakukan pada akhir Juli 2023. Namun, hal tersebut tertunda lantaran masih menunggu hasil audit dari BPKP.

'Memang tadinya kita mau di akhir Juli, namun setelah duduk dengan BPKP dia bilang September, butuh waktu, ya sudah kami tidak bisa dorong daripada kami mendorong sesuatu yang nanti komplikasi, tidak bisa membedakan yang mana korupsi, mana yang mismanagement. Ini kami jaga,' ungkap Erick.

'Kan membenarkan orang itu kan bukan sesuatu yang enak, mereka sendiri punya keluarga, punya sosial, jadi kami harus berhati-

hati,' lanjutnya.

Erick menyatakan sebelumnya Kementerian BUMN juga telah bersinergi dengan Kejagung dalam mengusut kasus Jiwasraya dan Asabri.

'Memang saya dengan Pak Tiko (Kartika Wirjoatmodjo/Wakil Menteri BUMN II) sejak awal kami bersama Kejaksaan Agung sudah melakukan banyak perbaikan di Jiwasraya, Asabri, dan ini kan hal-hal yang memang sudah lama sebenarnya di tahun 2006 bahkan, tetapi kami confidence ketika Bapak Presiden mengambil posisi,' ucap Erick.

Senada, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa permasalahan Dapen BUMN tersebut masih diinvestigasi oleh BPKP.

'Itu sedang diinvestigasi dengan BPKP. Jadi, sekarang lagi proses kami ajukan investigasi karena memang mereka kan investasinya rendah mungkin September (2023) ini selesai,' ucap Tiko, sapaan akrabnya.

Dia mengungkapkan ada empat dapen BUMN yang sedang diaudit BPKP. Namun, ia enggan merinci lebih lanjut. 'Jangan dong, itu kan masih azas praduga tidak bersalah. Nanti kalau diumumkan ternyata cuma mismanagement, kan nanti salah,' kata Tiko.

(Ant)

Judul	Anggota DPR Jadi Tersangka
Nama Media	Tribun Jambi
Newstrend	Anggota DPR Ismail Thomas ditetapkan tersangka kasus tambang
Halaman/URL	Pg7
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Negative

Anggota DPR Jadi Tersangka

- Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang
- Langsung Ditahan di Rutan Kejagung

JAKARTA, TRIBUN Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat anggota DPR RI, Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen.

"Tim penyidik Jampidsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial TI (Ismail Thomas) anggota Komisi I DPR RI atau bupati Kutai Barat 2006-2016," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga langsung ditahan. Ismail ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba cabang Kejaksaan. Berdasarkan pantauan, Ismail kemarin digiring keluar Gedung Pidana Khusus (Pidkus) Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol. Dia juga mengenakan rompi tahanan berwarna pink terang.

Ketut menyebut kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan di lahan yang sama ini melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ismail diduga memalsukan dokumen-dokumen terkait perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan

proses persidangan. Diduga tersangka kasus ini tak hanya Ismail, sebab dia dijerat dengan pasal 'bersama sama'.

"Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi proses belian adalah dengan orang lain yang belum kita tetapkan sebagai tersangka maka kita sangkakan pasal 55, palsu dan dokumen milik lahap persidangan," ucap Ketut. "Di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang dan selanjutnya ini masih dalam suatu proses peradilan dan kita ketemukan ybs salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen palsu untuk memenangkan suatu perkara," sambung Ketut. Meski begitu, Ketut tidak merincikan terkait dokumen apa saja yang dipalsukan oleh Ismail Thomas. "Dokumen tidak perlu kami sebutkan disini," tuturnya.

Ismail Thomas dijerat dengan Pasal 9 Undang-undang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. "Pasalnya adalah Pasal 9 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di 2021, statusnya adalah sebagai Anggota DPR RI," kata Ketut.

Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah menyita tam-

bang tersebut sebagai aset dari PT Gunung Bara Utama, anak perusahaan dari PT Trada Alam Minerba. PT Trada Alam merupakan milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat. Namun, PT Sendawar Jaya mengklaim sebagai pemegang izin sah lahan tambang tersebut. Mereka mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2022. Dalam gugatan tersebut, Kejagung terdaftar sebagai terut tergugat.

PT Sendawar Jaya memegang Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) batu bara nomor: 503/378/Distambing-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008. Kemudian Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008, dan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/K.781c/2008, Tanggal 9 September 2008.

Pengadilan memutuskan PT Sendawar Jaya yang berhak menguasai tambang tersebut. Kejagung yang terlanjur menyita lahan tersebut sebagai aset PT Gunung Bara Utama harus mengembalikannya kepada PT Sendawar Jaya. (tribun network/acf/abd/dod)

Judul	Anggota DPR Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan
Nama Media	Tribun Jateng
Newstrend	Anggota DPR Ismail Thomas ditetapkan tersangka kasus tambang
Halaman/URL	Pg1 dan 11
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	negative

Anggota DPR Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan

► Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang

JAKARTA, TRIBUN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat anggota DPR RI, Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. "Tim penyidik Jampidsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka instal IT (Ismail Thomas) anggota Komisi I DPR RI atau bupati Kutai Barat 2006-2016," kata Kapuspenkum

■ KE HALAMAN 11



LANGSUNG DITAHAN - Kejagung menjerat anggota DPR RI, Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen, Selasa (15/8). Tersangka sekaligus langsung dilakukan penahanan.

Anggota DPR...

■ DARI HALAMAN 1

Kejagung Ketut Sumedana di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga langsung ditahan. Ismail ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba cabang Kejaksaan. Berdasarkan pantauan, Ismail kemarin digiring keluar Gedung Pidana Khusus (Pidus) Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol. Dia juga mengenakan rompi tahanan berwarna pink terang.

Ketut menyebut kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan di lahan yang sama ini melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ismail diduga memalsukan dokumen-dokumen terka-

it perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Diduga tersangka kasus ini tak hanya Ismail, sebab dia dijerat dengan pasal 'bersama-sama'.

"Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi proses beliau adalah dengan orang lain yang belum kita tetapkan sebagai tersangka maka kita sangkakan pasal 55, palsuan dokumen untuk tahap persidangan," ucap Ketut. "Di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang dan selanjutnya ini masih dalam suatu proses peradilan dan kita ketemuan ybs salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen palsu untuk memenangkan suatu perkara," sambung Ketut.

Meski begitu, Ketut tidak merincikan terkait dokumen

apa saja yang dipalsukan oleh Ismail Thomas. "Dokumen tidak perlu kami sebutkan disini," tuturnya.

Ismail Thomas dijerat dengan Pasal 9 Undang-undang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. "Pasalnya adalah Pasal 9 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di 2021, statusnya adalah sebagai Anggota DPR RI," kata Ketut.

Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah menyita tambang tersebut sebagai aset dari PT Gunung Bara Utama, anak perusahaan dari PT Trada Alam Minerba. PT Trada Alam merupakan milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat. Namun, PT Sendawar Jaya mengklaim sebagai pemegang izin sah lahan tambang tersebut. Mereka mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2022. Dalam gugatan tersebut, Kejagung terdaftar sebagai turut tergugat.

PT Sendawar Jaya memegang Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) batu bara nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008. Kemudian Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008, dan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/K.781c/2008, Tanggal 9 September 2008.

Pengadilan memutuskan PT Sendawar Jaya yang berhak menguasai tambang tersebut. Kejagung yang terlanjur menyita lahan tersebut sebagai aset PT Gunung Bara Utama harus mengembalikannya kepada PT Sendawar Jaya. (**tribun network/aci/abd/dod**)

Judul	Anggota DPR RI Tersangka Kasus Tambang
Nama Media	Radar Pekalongan
Newstrend	Anggota DPR Ismail Thomas ditetapkan tersangka kasus tambang
Halaman/URL	Pg11
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Negative

Anggota DPR RI Tersangka Kasus Tambang

JAKARTA - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Selasa, menetapkan Ismail Thomas, anggota Komisi I DPR RI, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen terkait tambang.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Ismail Thomas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung terhitung dari

tanggal 15 Agustus sampai 3 September 2023.

"Bahwa pada hari ini, Selasa, 15 Agustus 2023, tim Penyidik Kejaksaan Agung Jampidsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2008-2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Gedung Bundar, Jakarta,

Selasa malam.

Ketut menjelaskan Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam perkara pemalsuan dokumen-dokumen terkait perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan persidangan.

"Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi, posisi kasusnya tadi," ujar Ketut.

Pada pertengahan Juni 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan

gugatan perbuatan melawan hukum PT Sendawar Jaya terhadap PT Gunung Bara Utama, perusahaan terpidana kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri Heru Hidayat, dan Kejaksaan Agung.

Gugatan tersebut terkait sengketa lahan pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, seluas 5.350 hektare yang dikiilam milik PT Sendawar Jaya.

Ketut menyebut pada tahap pertama kasus ini, Ke-

jaksaan Agung dinyatakan kalah (diminta untuk mengosongkan lahan), namun setelah melakukan upaya banding dinyatakan menang.

Dari upaya ini, terungkap bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan adalah palsu.

Ismail Thomas disangkakan melakukan pemalsuan dokumen bersama satu pihak lain yang belum ditetapkan sebagai tersangka

untuk memenangkan suatu perkara.

"Jadi, proses beliau ini adalah dengan orang lain, yang belum ditetapkan tersangka sehingga kami persangkakan juga pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan," kata Ketut.

Selain itu, penyidik juga mempersangkakan Ismail Thomas dengan Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Ia juga menegaskan kasus tersebut bukan perkara baru, tetapi sudah lama berjalan terkait dengan Heru Hidayat, terpidana kasus Jiwasraya dan Asabri.

Diketahui dalam amar putusan perkara Nomor 667/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, majelis hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan PT Sendawar Jaya atas kepemilikan lahan tambang batu bara sekitar 5.350 hektare di Kutai Barat, Kaltim. (an-tara)

Judul	Apakah Beli Produk Asuransi Bikin Rugi? Ini Penjelasannya
Nama Media	Waspada
Newstrend	Sosialisasi tentang Asuransi
Halaman/URL	PgA4
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Positive

Apakah Beli Produk Asuransi Bikin Rugi? Ini Penjelasannya

MEDAN, (Waspada): Mungkin kita pernah mendengar nasabah asuransi mengeluh rugi ketika pengajuan klaimnya ditolak. Tapi, benarkah penolakan klaim asuransi tersebut bersifat sepihak dan merugikan?

Mengutip analisa Mada Aryanugraha, seorang konsultan keuangan terkemuka Tanah Air, kebanyakan dari nasabah yang mengaku merasa dirugikan itu berasal dari nasabah yang bertahun-tahun, namun tidak mendapatkan apa-apa sampai dengan masa polis habis. Padahal, perlu dipahami bahwa sesuai prinsip dasarnya sebagai utmost good faith atau itikad baik untuk memberikan perlindungan, asuransi berperan memproteksi diri dan risiko kerugian finansial. Jadi, klaim dapat bersyarat jika terus diberikan kesehatan sehingga tidak mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit selama masa polis berlangsung, meski artinya tidak ada klaim yang dilakukan dan tambahan manfaat tidak dirasakan.

Isu serupa juga kerap ditemui

pada Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), di mana banyak mispersepsi di pihak nasabah ketika mengetahui jumlah manfaat nilai tunai yang tidak sama dengan jumlah biaya premi yang telah dibayarkan. Salah paham ini umumnya terjadi karena ketidaktauan nasabah atau kurangnya literasi terkait PAYDI. Sejatinya, PAYDI sendiri merupakan produk asuransi yang menekankan pada manfaat perlindungan, namun dilengkapi oleh manfaat investasi yang memperkuat proteksi.

Pada PAYDI, nasabah membayar premi untuk alokasi biaya asuransi dan juga investasi. Proporsi ini memberikan nilai lebih berupa nilai premi, yakni kondisi di mana nasabah menghendaki sementara waktu berhenti membayar premi namun manfaat proteksi tetap berjalan. Untuk itu, alokasi biaya asuransi akan dipotong dari nilai investasi yang sudah terbentuk. Oleh karenanya, manfaat nilai tunai pada PAYDI sudah pasti

akan berkurang karena digunakan untuk membayar biaya asuransi sesuai polis.

Keuntungan manfaat perlindungan serta nilai premi membuat PAYDI tidak dapat disamakan dengan produk deposito, investasi reksadana atau bahkan dengan investasi saham sekalipun. Manfaat nilai tunai di PAYDI memang fluktuatif seiring dengan perkembangan pasar modal atau risiko pasar yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dan/atau sentimen pasar modal. Karakter tersebut menyebabkan nilai investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga nilai unit yang dimiliki oleh pemegang polis juga mengikuti pergerakan pasar.

Cara cerdas menghindari anggapan 'rugi' saat berasuransi
Masih mengutip dari analisa Mada Aryanugraha, setidaknya ada dua faktor utama yang membuat nasabah asuransi merasa dirugikan saat klaim ditolak. Pertama adalah karena

faktor rendahnya literasi nasabah terkait produk asuransi, sehingga seringkali membeli polis bukan karena dasar kebutuhan. Faktor

kedua adalah mispersepsi antara tenaga pemasar asuransi dengan nasabah akibat tidak mempelajari dan memahami dengan baik polis yang disepakati. Kedua faktor tersebut bisa dihindari oleh calon nasabah dengan mempelajari produk asuransi yang akan dibeli, serta memahami rencana polis sebelum menandatangani ketentuan hak dan kewajibannya lewat tanda tangan.

Setiap perusahaan asuransi memberikan beragam pelatihan kepada tenaga perasarnya, untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan menguasai detail informasi produk yang akan dijual. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mewajibkan tenaga pemasar harus lulus ujian berkala dan memiliki sertifikasi tertentu selama menjual polis kepada masyarakat.



Sebagai bagian penting dalam kesehatan finansial, sekali lagi kita harus ingat bahwa manfaat utama asuransi adalah melindungi diri dari kerugian

finansial akibat suatu risiko, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya, bijaklah dalam membeli asuransi, pastikan polis sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan keuangan. Selain itu, calon nasabah juga harus cermat memastikan produk asuransi yang dipilih berasal dari perusahaan terpercaya. (m28)

Judul	Asa di Balik CSR Dunia Usaha
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2023
Halaman/URL	Pg1 dan 8
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Positive

Asa di Balik CSR Dunia Usaha

Hendra Widana
hendra.widana@bisnisindonesia.com

Tanggung jawab membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga di tangan dunia usaha.

Peran dunia usaha untuk mewujudkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 tersebut salah satunya dapat disalurkan melalui komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* (CSR).

Apalagi, pelaksanaan program CSR oleh perusahaan tidak hanya sebagai pengukur kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang (UU) No. 40/2007 tentang

Perseroan Terbatas saja. Lebih dari itu, agenda CSR oleh korporasi berperan besar dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial hingga pendanaan pembangunan di Indonesia.

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Onny Novromo menyatakan masalah yang paling besar dalam mencapai pembangunan nasional kini bersumber dari pendanaan.

Pemerintah telah membentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Belaid itu menjadi pendorong kolaborasi pendanaan baik dari APBN, APBD, BUMN,

dan swasta.

Pembangunan dari masyarakat lain termasuk perusahaan swasta dan BUMN salah satunya melalui program CSR.

Onny menyoroti masalah pendanaan yang menjadi penting untuk menyukseskan pembangunan Indonesia menuju negara maju yang masuk dalam kategori *high income country* atau negara berpendapatan tinggi.

"Semoga CSR lebih berperan sebagai salah satu sumber dana pembangunan nasional, ekonomi, dan masyarakat kita," katanya dalam Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2023, Selasa (15/8).

• Bersambung ➔



Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi B. Sukamdani (kedua dari kiri) dan Presiden Direktur Lulu Terianto (tengah) berfoto bersama perwakilan peraih penghargaan The Best Award for Volunteer Elements yaitu PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju, The Best Award for Environmental Elements yaitu PT Pertamina EP Papua Fields, The Best Award for Disaster Management Elements yaitu PT Prudential Life Assurance Indonesia, The Best Award for Economy Elements yaitu PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dan The Best Award for Social Elements adalah PT Adero Energy Indonesia Tbk. pada acara Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2023 di Jakarta, Selasa (15/8).

Asa di Balik CSR Dunia Usaha (Sambungan dari Hal. 1)

Onny mencatat pemerintah telah merencanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Salah satu program prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKPP) 2024 yang berhubungan langsung dengan program CSR, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Budi Santoso Sukamdani mengatakan, penyelenggaraan BISRA 2023 yang memasuki tahun ketiga tidak semata-mata mengapresiasi perusahaan baik dalam penyelenggaraan program CSR.

"Program CSR bukanlah sekadar kegiatan basa-basi dan formalitas semata, tetapi merupakan sebuah bentuk tanggung jawab moral bagi perusahaan," kata Hariyadi.

Menurutnya, setiap tahun ajang BISRA dirancang untuk menjadi barometer kualitas program-program CSR perusahaan.

Tak hanya itu, BISRA juga akan menjadi tolak ukur manfaat CSR bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Hariyadi berharap apresiasi BISRA bisa memberikan dorongan kepada korporasi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan program-program CSR.

"Dengan demikian, kita makin optimistik dan meyakini bahwa

program CSR dapat berkontribusi lebih signifikan dalam membangun atau mendukung percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)," ujarnya.

Dalam konteks percepatan SDGs, setiap institusi bisnis memiliki peran penting, agar penyelenggaraan program CSR dapat makin relevan dalam mendukung kebijakan pemerintah, sekaligus mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Ini adalah suatu komitmen yang sangat luar biasa dari bangsa Indonesia untuk mengedepankan tanggung jawab sosial lingkungan dari korporasi," terangnya.

Dalam BISRA 2023 yang mengangkat tema *Corporate Social Responsibility Towards Climate Change Mitigation*, sebanyak 52 perusahaan terbaik di bidang CSR telah terpilih melalui proses penjurian yang objektif dari dewan juri yang memiliki pengetahuan mendalam pada bidang CSR.

National Director Habitat for Humanity Indonesia Susanto Samudhin selaku Dewan Juri BISRA 2023 mengatakan, penghargaan CSR diberikan kepada perusahaan yang mengadakan program terbaik dengan dampak sosial yang nyata.

"Di setiap rupiah yang ditanamkan dalam program CSR harus membawa perubahan positif kepada komunitas, itu yang menjadi tujuan. Kita yang makin lama akan

makin kami tanyakan di setiap programnya," kata Susanto.

Pada ajang BISRA 2023 diikuti oleh 72 peserta yang menghadirkan 120 program, dengan setiap perusahaan memberikan beberapa program CSR.

"Metode penjurian kami tetap memakai data kualitatif dan kuantitatif. Kami harus menilai dan mengukur, serta kami memakai *social return on investment* [SROI]," ujarnya.

Susanto memberikan salah satu contoh program terbaik yang memberikan dampak nyata yang berkelanjutan. Program CSR itu dirancang untuk 2021–2024 dengan dana yang telah terencana.

Inisiasi yang dilakukan, yakni pembuatan fasilitas air dengan target pada 2024 dapat memberikan kapasitas 100.000 liter, jaringan distribusi air kepada dua distrik di Kabupaten Sorong, dan pembuatan bisnis usaha air bersih kemasan.

"Mereka ukur dengan SROI di mana capaiannya cukup besar, yakni 15,5 berarti Rp1 yang ditanamkan untuk program ini memberikan manfaat 15 kali. Kalau itu dalam bentuk program Rp1 miliar berarti hasil manfaat dari program ini adalah Rp15 miliar," paparnya.

Susanto memaparkan, penghargaan BISRA 2023 diberikan dengan mengacu kepada lima kategori yang mencakup elemen

ekonomi, lingkungan, sosial, kerelawanan, dan mitigasi kebencanaan. Setiap kategori terdiri atas tiga kelas yang mewakili tingkat pendapatan dan skala bisnis perusahaan, yakni platinum, gold, dan silver.

Pemenang BISRA 2023 untuk elemen ekonomi skala bisnis platinum diraih PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Pabrik Narogong.

Untuk skala bisnis gold diraih PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), PT Tirta Investama Wonosobo, PT Tirta Investama Pandan Pasuruan, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Cita Mineral Investindo Tbk. (CITA), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) Area Kamojang, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKI), dan PT Pertamina (Persero).

Khusus silver dimenangkan oleh PT Agincourt Resources, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Boyolali, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sanggaran, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS), PT Migas Utama Jabar (Persero), PT Insight Investments Management, dan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek.

Dalam kategori elemen sosial dengan skala platinum diraih PT Adam Energy Indonesia Tbk. (ADKO), sedangkan skala silver

diraih oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG).

Khusus elemen lingkungan dengan skala platinum dimenangkan oleh PT Pertamina EP Papua Fields, dan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (INTP).

Khusus skala gold untuk elemen lingkungan diraih PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Baran Coal, PT Jasa Armada Indonesia Tbk., dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF).

Untuk silver diraih PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA).

Sebaliknya, elemen kerelawanan skala platinum diraih PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju. Untuk elemen kebencanaan skala gold diraih PT Prudential Life Assurance Indonesia dan PT Migas Hulu Jabar ONWJ. Khusus silver diraih PT Allianz Assurance Life Indonesia.

Dalam ajang BISRA 2023, terdapat penghargaan *special achievement* dengan masuk kategori *Most Committed Company in Implementing CSR Social Movement through Teman Pisut 100% untuk Indonesia Program* yang diraih PT Sinartren Telecom Tbk.

Untuk kategori *Most Committed Energy Sector Company in Implementing CSR Economics Development* dimenangkan oleh PT Pertamina (Persero). (Sumber: Rizki Kamahua/Alifah Rahmah Nurhidayah/Patrick Tjandra/18

Judul	Bank DBS Dan Manulife Luncurkan MiWISE
Nama Media	Waspada
Newstrend	Bank DBS Indonesia Dan Manulife Indonesia Luncurkan MiWISE
Halaman/URL	PgA5
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Positive



Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia meluncurkan MiWealth Infinite Assurance (MiWiSE). Solusi asuransi ini dirancang khusus bagi nasabah High-Net-Worth (HNW) untuk menciptakan dan membangun solusi perencanaan pensiun/pengalihan kekayaan legacy bagi keluarga mereka.

Bank DBS Dan Manulife Luncurkan MiWISE

JAKARTA (Waspada) Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia meluncurkan MiWealth Infinite Assurance (MiWiSE). Solusi asuransi ini dirancang khusus bagi nasabah High-Net-Worth (HNW) untuk menciptakan dan membangun solusi perencanaan pensiun/pengalihan kekayaan legacy bagi keluarga mereka.

Peluncuran ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan perencanaan legacy bagi nasabah di Indonesia. Berdasarkan hasil survei 2022 Future Ready Survey yang dilakukan oleh Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia, 67 persen responden menyatakan bahwa mereka memiliki tujuan hidup untuk memberikan pengalihan kekayaan kepada generasi penerus, namun hanya 48 persen dari mereka yang telah memiliki rencana untuk mewujudkannya.

Sementara itu, survei Asian Private Banker 2019 menunjukkan bahwa 60 persen nasabah HNW di Asia tidak memiliki rencana pengalihan kekayaan yang jelas dan matang.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Chu Cheng Tan mengungkapkan, peluncuran MiWiSE merupakan bukti komitmen Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia untuk memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Katni memahaminya bahwa nasabah sering kali merasa khawatir akan masa depan yang tidak pasti, sehingga MiWiSE merupakan solusi yang tepat untuk membangun masa depan yang aman dan tangguh dengan cara yang fleksibel.

Salah satu prinsip "Live more, Bank less" yang kami pegang untuk mendukung nasabah menata kehidupan yang lebih hemat dengan layanan yang aman dan terpercaya," ujarnya dalam siaran persnya, Senin (14/8).

Presiden Direktur & CEO Manulife Indonesia, Ryan Chaudhry menyebutkan, MiWiSE dirancang untuk membantu nasabah menata perencanaan legacy bagi keluarga mereka.

Bersama dengan Bank DBS Indonesia, Manulife meluncurkan solusi inovatif ini untuk memperkuat perencanaan dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

"MiWiSE tidak hanya menyediakan fitur-fitur keuangan yang menarik dan fleksibilitas untuk berinvestasi dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat, namun juga menyediakan perjalanan nasabah kami dengan pengalaman yang mudah," ujarnya.

Selain manfaat finansial, MiWiSE juga menawarkan perlindungan penyakit underwriting dari pemeriksaan non-medical untuk nasabah dengan nilai pertanggungan hingga Rp5 miliar.

Hingga saat ini, Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia telah melindungi sekitar 7.000 nasabah di seluruh Indonesia dan

terus memperkuat komitmennya untuk memenuhi kebutuhan finansial lebih banyak lagi keluarga Indonesia. (rta31)

Judul	Bank DBS-Manulife Luncurkan MiWISE
Nama Media	Jabar Ekspres
Newstrend	Bank DBS Indonesia Dan Manulife Indonesia Luncurkan MiWISE
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Positive

KOLABORASI



BANGUN KERJA SAMA: Bank DBS-Manulife resmi meluncurkan MiWISE.

Bank DBS-Manulife Luncurkan MiWISE

JAKARTA – Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia meluncurkan MiWealth Infinite Assurance (MiWISE). Solusi asuransi ini dirancang khusus bagi nasabah High-Net-Worth (HNW) untuk menciptakan dan membangun solusi perencanaan peninggalan berharga (legacy) bagi keluarga mereka. Peluncuran ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan perencanaan legacy bagi nasabah di Indonesia. Berdasarkan hasil survei 2022 Future Ready Survey yang dilakukan oleh Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia, 67 persen responden menyatakan bahwa mereka memiliki tujuan hidup untuk memberikan peninggalan berharga kepada generasi penerus, namun hanya 48 persen dari mereka yang telah memiliki rencana untuk mewujudkannya. Sementara itu, survei Asian Private Banker 2019 menunjukkan bahwa 60 persen nasabah HNW di Asia tidak memiliki rencana peninggalan berharga yang jelas dan matang. "Peluncuran MiWISE merupakan bukti komitmen Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia untuk memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kami memahami bahwa nasabah sering kali merasa khawatir akan masa depan yang tidak pasti, sehingga MiWISE merupakan solusi yang tepat untuk membangun masa depan yang aman dan tangguh dengan cara yang fleksibel. Hal ini sejalan dengan prinsip 'Live more, Bank less' yang kami usung untuk mendukung nasabah menjalani kehidupan yang lebih bermakna dengan layanan yang aman dan terpercaya," ujar Chu Chong Lim, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia. "MiWISE dirancang untuk membantu nasabah membuat perencanaan legacy bagi keluarga mereka. Bersama dengan Bank DBS Indonesia, kami meluncurkan solusi inovatif ini untuk memperkuat komitmen kami dalam memenuhi kebutuhan nasabah. MiWISE tidak hanya menyediakan fitur-fitur keuangan yang menarik dan fleksibilitas untuk berinvestasi dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat, namun juga menyederhanakan perjalanan nasabah kami dengan pengalaman yang mudah," ujar Ryan Charland, Presiden Direktur & CEO Manulife Indonesia.

Selain manfaat finansial, MiWISE juga menawarkan penyederhanaan persyaratan underwriting dan pemeriksaan non-medis untuk nasabah dengan nilai pertanggungan hingga Rp5 miliar (**a1**)

Judul	Bank of Singapore Beli 5% Saham MREI
Nama Media	Kontan
Newstrend	Minat asing pada perusahaan asuransi di Indonesia
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Positive

■ AKUISISI ASING

Bank of Singapore Beli 5% Saham MREI

JAKARTA. Minat asing pada perusahaan asuransi di Indonesia masih tinggi. Kali ini asing membeli perusahaan reasuransi, PT Maskapai Reasuransi Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan Marein. Bank of Singapore mengumumkan telah membeli 5% saham Marein.

Adella Yudhi Kurniawan, Manajer PT Edi Indonesia Biro Administrasi Efek, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), menjelaskan, ada perubahan kepemilikan 5% atau lebih pada saham berkode MREI ini. Sekitar 5% kepemilikan saham MREI saat ini, atau setara de-

Marein sebagai perusahaan terbuka memperjualbelikan sahamnya secara publik sehingga tidak mengetahui keseluruhan proses *trading* saham. "Dalam waktu dekat kami tidak ada aksi korporasi yang akan dilakukan," ujar Tamara kepada KONTAN.

Akibat transaksi tersebut, kini Bank of Singapore menjadi pemegang saham ketiga terbesar di Marein. Sumber *Bloomberg* menyebut, anak perusahaan Oversea Chinese Banking Corp (OCBC) ini dikabarkan akan kembali menambah kepemilikan saham dari posisi saat ini.

Kepala Departemen Perizinan Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas IKNB OJK, Asep Iskandar mengatakan, transaksi pembelian saham oleh investor asing ini dilakukan sesuai ketentuan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jadi jual beli saham emiten yang tercatat di bursa tidak perlu meminta persetujuan OJK, karena nilai transaksi tidak menyebabkan perubahan pengendalian pada perusahaan asuransi. Kepemilikan asing di perusahaan reasuransi dibatasi hingga 80%.

Asep menyebut, di sepanjang tahun ini akuisisi atas perusahaan asuransi cukup bervariasi. "Terdapat transaksi pengalihan saham atau akuisisi dalam bentuk transaksi antar grup dan ada juga yang dibeli perusahaan asuransi Korea," kata dia.

OJK mengaku akan terus berkomunikasi dan memperhatikan beberapa calon investor yang mengambilalih perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia.

**Bank of
Singapore
memiliki 25,82
juta setara 5%
saham MREI.**

ngan 25,82 juta saham, dipegang Bank of Singapore Ltd.

Kemudian PT Graha Sentosa memiliki 20,53%, setara dengan 106,28 juta saham. Lalu, AJB Bumiputera tercatat memegang 14,84% saham, setara dengan 76,82 juta saham.

Manajemen MREI mengaku tidak tahu menahu akan transaksi ini. Direktur Kepatuhan sekaligus Sekretaris Perusahaan Marein Tamara Arista mengatakan, manajemen perusahaan tidak mengetahui mengenai proses *trading* saham yang dilakukan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali Marein.

Tamara juga mengatakan,

Vina Destya, Ferry Saputra

Judul	DBS dan Manulife Indonesia Luncurkan Solusi Perencanaan Legacy
Nama Media	Inilah
Newstrend	Bank DBS Indonesia Dan Manulife Indonesia Luncurkan MiWISE
Halaman/URL	Pg2
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Positive

DBS dan Manulife Indonesia Luncurkan Solusi Perencanaan Legacy

INILAH, Bandung - Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia meluncurkan *MiWealth Infinite Assurance* (MiWISE). Solusi asuransi ini dirancang khusus bagi nasabah *high-net-worth* (HNW) untuk menciptakan dan membangun solusi perencanaan peninggalan berharga (*legacy*) bagi keluarga mereka.

Peluncuran MiWISE dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan perencanaan legacy bagi nasabah di Indonesia. Berdasarkan hasil survei 2022 *Future Ready Survey* yang dilakukan Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia, 67% responden menyatakan mereka memiliki tujuan hidup untuk memberikan peninggalan berharga kepada generasi penerus, namun hanya 48% dari mereka yang telah memiliki rencana untuk mewujudkannya.

Sementara, survei *Asian Private Banker* 2019 menunjukkan, 60% nasabah HNW di Asia tidak memiliki rencana peninggalan berharga yang jelas dan matang.

"Peluncuran MiWISE merupakan bukti komitmen Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia untuk memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kami memahami bahwa nasabah sering kali merasa khawatir akan masa depan yang tidak



pasti, sehingga MiWISE merupakan solusi yang tepat untuk membangun masa depan yang aman dan tangguh dengan cara yang fleksibel. Hal ini sejalan dengan prinsip '*Live more, Bank less*' yang kami usung untuk mendukung nasabah menjalani kehidupan yang lebih bermakna dengan layanan yang aman dan terpercaya," ujar Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Chu Chong Lim, beberapa

waktu lalu.

"MiWISE dirancang untuk membantu nasabah membuat perencanaan *legacy* bagi keluarga mereka. Bersama dengan Bank DBS Indonesia, kami meluncurkan solusi inovatif ini untuk memperkuat komitmen kami dalam memenuhi kebutuhan nasabah. MiWISE tidak hanya menyediakan fitur-fitur keuangan yang menarik dan fleksibilitas untuk berinvestasi

si dalam mata uang rupiah maupun dolar Amerika Serikat, namun juga menyederhanakan perjalanan nasabah kami dengan pengalaman yang mudah," kata Presiden Direktur & CEO Manulife Indonesia Ryan Charland.

Selain manfaat finansial, MiWISE juga menawarkan penyederhanaan persyaratan underwriting dan pemeriksaan non-medis untuk nasabah dengan nilai pertanggungan

hingga Rp5 miliar.

Hingga saat ini, Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia telah melindungi sekitar 7.000 nasabah di seluruh Indonesia dan terus memperkuat komitmennya untuk memenuhi kebutuhan finansial lebih banyak lagi keluarga Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai MiWISE, kunjungi cabang-cabang Bank DBS Indonesia terdekat. (dnr)

Judul	Diduga Palsukan Dokumen Perusahaan Tambang
Nama Media	Kaltim Post
Newstrend	Anggota DPR Ismail Thomas ditetapkan tersangka kasus tambang
Halaman/URL	Pg1 dan 11
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	negative



DITAHAN KEJAGUNG: Setelah ditetapkan tersangka pemalsuan dokumen kemarin (15/8), Ismail Thomas langsung ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksanaan, Jakarta.

Diduga Palsukan Dokumen Perusahaan Tambang

Ditetapkan Tersangka, Mantan Bupati Kubar Ditahan Kejagung

Ismail Thomas diduga berperan memalsukan dokumen izin pertambangan yang digunakan untuk memenangkan perkara dalam tahap persidangan. Skandal itu dilakukan saat Ismail Thomas menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI.

JAKARTA—Mantan bupati Kutai Barat (Kubar) periode 2006-2011 dan 2011-2016, Ismail Thomas, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang. Sejak kemarin

(15/8), politikus PDI Perjuangan yang saat ini menjabat anggota DPR RI dari Kaltim di Serayan, langsung ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksanaan, Jakarta.

Baca **DIDUGA**... Hal 11



Tanggal lapor:
10 November 2009

Dupai Kutai Periode 2006-2011

Rp 3.800.712.450

Tanggal lapor:
20 Oktober 2010

Calon Dupai Kutai Periode 2011-2016

Rp 3.693.519.450



Tanggal lapor:
7 April 2014

Rupai Kutai Periode 2011 - 2016

Rp 4.509.832.000

Tanggal lapor:
1 Januari 2016

Rupai Kutai Periode 2011 - 2016

Rp 6.566.677.521

Tanggal lapor:
14 September 2021

Anggota DPR RI

Rp 9.758.886.700

Tanggal lapor:
4 Juli 2023

Anggota DPR RI

Rp 9.823.386.700

DIDUGA

Sambungan dari hal 1

"Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspekhum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan persnya tadi malam. Ketut menyebut, 11 (Ismail Thomas) menandatangani sejumlah dokumen pada 2021 lalu. Saat itu, Ismail Thomas bertugas sebagai anggota Komisi I DPR RI. Oleh Kejagung, pria berkacamata itu disinghkan telah melanggar Pasal 9 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara tersebut, lanjut Ketut, IT berperan memalsukan dokumen-dokumen izin pertambangan yang digunakan

untuk kepentingan persidangan.

"Itu perannya, terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya," imbuh dia. Dokumen-dokumen palsu itu dibuat Ismail Thomas untuk memenangkan perkara dalam tahap persidangan. Didaki Ketut, dalam sidang pertama Kejagung kalah. Namun setelah didalami, dokumen yang digunakan dalam sidang tersebut palsu. Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Salamin mengatakan, langkah Kejagung menetapkan dan menahan Ismail Thomas dalam kasus dugaan korupsi pemalsuan dokumen tambang perlu diapresiasi.

Fasalnya, mampu mengungkap kasus lama terkait tata lola tambang. "Ini artinya, negara tidak melupakan kasus lama, tetap mengusutnya," paparnya. Bagikruptor, ini menjadi sebuah wani-

ing. Bukan berarti bisa melakukan korupsi sudah lama tidak akan diusut. Tapi, tetap akan diusut dan harus dipertanggungjawabkan. "Jadi, koruptor akan berpikir berulang kali," jelasnya. Menurut dia, prestasi Kejagung langkah karena mampu menyelamatkan triliunan rupiah uang negara, sekaligus tidak melakukan pembiasaan terhadap kasus lama. "Kinerjanya semakin baik," paparnya kemarin.

Langkah Kejagung juga mendukung perbaikan tata lola tambang. Sebab, uang hasil pengelolaan tambang tidak boleh untuk konsumsioner tersebut. Seharusnya, uang hasil pengelolaan tambang itu masuk semua ke negara. "Ini memperbalik pendapatan negara," ujarnya. Sebelum sebelum Kejagung menetapkan Ismail Thomas sebagai tersangka, pada Senin (7/8) lalu, tim Satgasus Kejagung

mengeledah Kantor Bupati Kutai, Kecamatan Barong Tongkok Rombongan Kejagung memasuki kantor bupati sekitar pukul 08.30 Wita dan disawal petugas personel TNI. Mereka langsung menuju ruangan Bagian Hukum Setiab Kubar. Selain kantor bupati, tim tersebut juga memeriksa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kemudian, tim langsung menuju kantor Kejati Kutai. Penggeledahan itu terkait dengan perizinan perusahaan tambang Ismail Thomas. Yaitu PT Gunung Batu Utama (GBU) dan PT Sendawar Jaya. "Saya tidak tahu sampai ke dalam, tetapi kasus izin tambang tahun 2008 itu yang ada masalah. Karena kalau tidak salah tadi ada dua perusahaan memiliki izin dan nomor yang sama, dan lokasi sama itu saja," kata Bupati Kutai Barat FX Yapan

ketika dikonfirmasi saat pengeledahan pekan lalu.

Disputa tidak menimbulkan kompromi soal pengeledahan tersebut. Dinyatakan penggeledahan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya untuk menyelidiki kasus dimaksud. "Jadi, apapun yang mereka cari, kalau ada silakan. Buat berita acara kalau mereka bawa. Kalau tidak ada ya, kita tidak bisa bilang ada kalau ada sama kita. Untuk sementara tadi mereka bawa berita acaranya mereka minta copy-nya," kata Yapan.

Dari pemelajaran Kaltim Post, Kejagung dan PT Gunung Batu Utama sebelumnya digugat oleh PT Sendawar Jaya. Gugatan ini bermula dari sita eksekusi yang dilakukan Kejagung pada 18-19 Juni 2022. Kala itu, Kejagung menyita lahan tambang seluas 5.350 hektare yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kutai. Lahan tersebut disita

atas perkara korupsi dana Asuransi Jiwasraya dengan terpidana Heru Hidayat yang dihukum membayar uang pengganti sekitar Rp 10 triliun. Kejagung lalu menggugat PT GBU. Namun, penguitan ini dipersoalkan PT Sendawar Jaya yang mengklaim sebagai pemilik lahan konsesi yang sah. Mereka mendefinisikan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2020. PT Sendawar Jaya mengklaim sebagai pemegang izin konsesi yang sah. Dalam gugatannya, PT Sendawar Jaya meminta hakim menyatakan para tergugat, di antaranya Kejagung, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan PT Sendawar Jaya sebagai pemilik lahan/lokasi pertambangan banbara seluas 5.350 hektare di Kecamatan Damai, PN Jakarta Selatan adalah yang mengabdikan sebagian gugatan PT Sendawar Jaya. (*/luk/ide/spm/jpg/riz/kas)

Judul	Kejagung Tahan Ismail Thomas
Nama Media	Koran Kaltim
Newstrend	Anggota DPR Ismail Thomas ditetapkan tersangka kasus tambang
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	negative

Kejagung Tahan Ismail Thomas

Dugaan Korupsi Penerbitan Izin Tambang

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Ismail Thomas menjadi tersangka korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang, Selasa (15/8). Mantan Bupati Kutai Barat itu pun langsung ditahan.

Kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan di lahan yang sama ini melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kaltim.

"Tim penyidik Jampidsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial IT (Ismail Thomas) anggota Komisi I DPR RI atau bupati Kutai Barat 2006-2016," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (15/8).

Ketut menjelaskan kasus ini terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen PT Sendawar Jaya. Menurutnya, Ismail diduga memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan izin tambang di Kutai Barat. "Kita temukan yang



LANGSUNG DITAHAN: Petugas Kejagung menahan Ismail Thomas, Anggota DPRD RI sekaligus mantan Bupati Kubar terkait korupsi pemalsuan izin tambang.

bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen palsu," ujarnya.

Ismail ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba cabang Kejaksaan. Politikus PDIP itu dijerat dengan pasal 9 Undang-undang Tipikor juncto pasal 55

KUHP.

Kejaksaan Agung sebelumnya menyita tambang tersebut sebagai aset dari PT Gunung Bara Utama, anak perusahaan dari PT Trada Alam Minerba. PT Trada Alam merupakan milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru

Hidayat.

Namun, PT Sendawar Jaya mengklaim sebagai pemegang izin sah lahan tambang tersebut. Mereka mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2022. Dalam gugatan tersebut, Kejagung terdaftar sebagai turut tergugat.

PT Sendawar Jaya memegang Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) batu bara nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008.

Kemudian Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008, dan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/K.781c/2008, Tanggal 9 September 2008.

Pengadilan memutuskan PT Sendawar Jaya yang berhak menguasai tambang tersebut. Kejagung yang terlanjur menyita lahan tersebut sebagai aset PT Gunung Bara Utama, harus mengembalikannya kepada PT Sendawar Jaya. (cnn/sh/ga)

Judul	Kejagung Tetapkan Ismail Thomas Jadi Tersangka Izin Tambang
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Anggota DPR Ismail Thomas ditetapkan tersangka kasus tambang
Halaman/URL	Pg16
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Negative

Kejagung Tetapkan Ismail Thomas Jadi Tersangka Izin Tambang

JAKARTA, ID - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Selasa, menetapkan Ismail Thomas, anggota Komisi I DPR RI, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen terkait tambang.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Ismail Thomas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung terhitung dari tanggal 15 Agustus sampai 3 September 2023.

"Bahwa pada hari ini, Selasa, 15 Agustus 2023, tim Penyidik Kejaksaan Agung Jampidsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Gedung Bundar, Jakarta, Selasa (15/08/2023).

Ketut menjelaskan Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam perkara pemalsuan dokumen-dokumen terkait perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan persidangan. "Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi, posisi kasusnya tadi," ujar Ketut.

Pada pertengahan Juni 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum PT Sendawar Jaya terhadap PT Gunung Bara Utama, perusahaan



Kejaksaan Tahan Anggota DPR

Anggota DPR RI Ismail Thomas (tengah) digelandang petugas Kejaksaan ke mobil tahanan, usai diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/8/2023). Kejaksaan Agung memeriksa anggota Komisi I DPR RI yang juga Bupati Kutai Barat 2006-2016 Ismail Thomas terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya.

terpidana kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri Heru Hidayat, dan Kejaksaan Agung.

Gugatan tersebut terkait sengketa lahan pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai

Barat, Kalimantan Timur, seluas 5.350 hektare yang diklaim milik PT Sendawar Jaya.

Ketut menyebut pada tahap pertama kasus ini, Kejaksaan Agung dinyatakan kalah (diminta

untuk mengosongkan lahan), namun setelah melakukan upaya banding dinyatakan menang.

Dari upaya ini, terungkap bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk kepentingan

proses persidangan adalah palsu.

Ismail Thomas disangkakan melakukan pemalsuan dokumen bersama satu pihak lain yang belum ditetapkan sebagai

tersangka untuk memenangkan suatu perkara.

"Jadi, proses beliau ini adalah dengan orang lain, yang belum ditetapkan tersangka sehingga kami persangkakan juga pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan," kata Ketut.

Selain itu, penyidik juga mempersangkakan Ismail Thomas dengan Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Ketut enggan merinci apa saja dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh tersangka karena proses penyidikan sedang berjalan.

Ia juga menegaskan kasus tersebut bukan perkara baru, tetapi sudah lama berjalan terkait dengan Heru Hidayat, terpidana kasus Jiwasraya dan Asabri.

Diketahui dalam amar putusan perkara Nomor 667/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, majelis hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan PT Sendawar Jaya atas kepemilikan lahan tambang batu bara sekitar 5.350 hektare di Kutai Barat, Kaltim.

Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim menyatakan PT Sendawar Jaya merupakan pemilik yang sah atas lahan/lokasi pertambangan batu bara seluas 5.350 hektare di Kutai Barat.

Selain itu, menghukum tergugat I atau perusahaan Heru Hidayat dan pihak-pihak yang menguasai lahan agar mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat. (b1/ant)

Judul	Luncurkan MiWISE, Solusi Perencanaan Legacy yang Fleksibel
Nama Media	Duta Masyarakat
Newstrend	Bank DBS Indonesia Dan Manulife Indonesia Luncurkan MiWISE
Halaman/URL	Pg6
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Positive

BANK DBS INDONESIA DAN MANULIFE INDONESIA

Luncurkan MiWISE, Solusi Perencanaan Legacy yang Fleksibel

SURABAYA - Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia meluncurkan MiWealth Infinite Assurance (MiWISE). Produk ini

diluncurkan sebagai solusi asuransi yang dirancang khusus bagi nasabah High-Net-Worth (HNW) untuk menciptakan dan mem-

bangun perencanaan peninggalan berharga (legacy) bagi keluarga.

Peluncuran ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan perencanaan legacy bagi nasabah di Indonesia. Berdasarkan hasil survei 2022 Future Ready Survey yang dilakukan oleh Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia, 67 persen responden menyatakan bahwa mereka memiliki tujuan hidup untuk memberikan peninggalan berharga kepada generasi penerus, namun hanya 48 persen dari mereka yang telah memiliki rencana untuk mewujudkannya.

Sementara itu, survei Asian Private Banker 2019 menunjukkan bahwa 60 persen nasabah HNW di Asia tidak memiliki rencana peninggalan berharga yang jelas dan matang.

"Peluncuran MiWISE merupakan bukti komitmen Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia

untuk memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kami memahami bahwa nasabah sering kali merasa khawatir akan masa depan yang tidak pasti, sehingga MiWISE merupakan solusi yang tepat untuk membangun masa depan yang aman dan tangguh dengan cara yang fleksibel.

Hal ini sejalan dengan prinsip 'Live more, Bank less' yang kami usung untuk mendukung nasabah menjalani kehidupan yang lebih bermakna dengan layanan yang aman dan terpercaya," ujar Chu Chong Lim, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia.

Menurutnya, MiWISE dirancang untuk membantu nasabah membuat perencanaan legacy bagi keluarga mereka. "Bersama dengan Bank DBS Indonesia, kami meluncurkan solusi inovatif ini untuk memperkuat komitmen kami dalam memenuhi kebutuh-

an nasabah. MiWISE tidak hanya menyediakan fitur-fitur keuangan yang menarik dan fleksibilitas untuk berinvestasi dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat, namun juga menyederhanakan perjalanan nasabah kami dengan pengalaman yang mudah," ujar Ryan Charland, Presiden Direktur & CEO Manulife Indonesia.

Selain manfaat finansial, MiWISE juga menawarkan penyelesaian persyarikan underwriting dan pemeriksaan non-medis untuk nasabah dengan nilai pertanggungan hingga Rp5 miliar.

Hingga saat ini, Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia telah melindungi sekitar 7.000 nasabah di seluruh Indonesia dan terus memperkuat komitmennya untuk memenuhi kebutuhan finansial lebih banyak lagi keluarga Indonesia. • imm



DBS/DBS

MANULIFE Indonesia dan Bank DBS Indonesia meluncurkan MiWealth Infinite Assurance (MiWISE).

Judul	Mantan PM Malaysia Bebas Dari Empat Dakwaan Suap
Nama Media	Waspada
Newstrend	Mantan PM Malaysia bebas dari empat dakwaan suap
Halaman/URL	PgA3
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	neutral

Mantan PM Malaysia Bebas Dari Empat Dakwaan Suap

KUALALUMPUR (Waspada): Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa (15/8/2023) mengabulkan permohonan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin untuk membebaskannya dari empat dakwaan penyalahgunaan kuasa menerima suap RM232,5 juta (sekitar Rp769 miliar) terkait proyek Jana Wibawa.

Muhyiddin kepada media mengatakan hakim telah membuat keputusan yang menyata-

kan bahwa semua tuduhan terhadapnya tidak benar, salah dari segi hukum dan seba-

gainya.

"Oleh karena itu, permohonan saya telah disetujui dan saya dibebaskan dari segala bentuk tuduhan yang diontarkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap saya," ujar dia.

Ia mengatakan sejak awal merasa tuduhan itu bermotif politik, dan menegaskan dirinya tidak melakukan kesalahan apapun, baik yang melanggar

undang-undang Komisi Anti Korupsi Malaysia (SPRM) maupun undang-undang lainnya.

Pengadilan Tinggi Malaysia membebaskan mantan PM Malaysia Muhyiddin setelah majelis hakim pengadilan tersebut mendapati keempat tuduhan tersebut kabur dan tidak berdasar karena tidak menyatakan secara rinci pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, hakim juga mengatakan Muhyiddin didakwa atas pelanggaran yang tidak diketahui hukumnya.

Muhyiddin selaku Perdana Menteri sekaligus Presiden Partai Bersatu saat itu, antara Maret 2020 hingga Agustus 2021, dituduh menggunakan kedudukannya untuk menerima suap dari Bukhary Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd, Mamfor Sdn Bhd dan Azman Yusoff yang merupakan presiden dari sebuah organisasi kontraktor di Malaysia.

Jana Wibawa merupakan proyek yang menjadi program pembangunan khusus yang dilakukan oleh kontraktor Bumiputera di masa pandemi COVID-19 lalu. Pendanaan proyek tersebut mengambil dari dana stimulus ekonomi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Malaysia kala itu terkait penanganan pandemi.

(ant)



Antara

MANTAN Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin memberikan keterangan pada media usai mengikuti sidang di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Selasa (15/8/2023).

Judul	Mantan PM Malaysia, Muhyiddin Bebas dari Dakwaan Suap
Nama Media	Koran Kaltim
Newstrend	Mantan PM Malaysia bebas dari empat dakwaan suap
Halaman/URL	Pg24
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	neutral

Mantan PM Malaysia, Muhyiddin Bebas dari Dakwaan Suap

KUALA LUMPUR – Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa (15/8) mengabulkan permohonan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin untuk membebaskannya dari empat dakwaan penyalahgunaan kuasa menerima suap RM232,5 juta (sekitar Rp 769 miliar) terkait proyek Jana Wibawa.

Muhyiddin kepada media mengatakan hakim telah membuat keputusan yang menyatakan semua tuduhan terhadapnya tidak benar, salah dari segi hukum dan sebagainya.

“Oleh karena itu, permohonan saya telah disetujui dan saya dibebaskan dari segala bentuk tuduhan yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap saya,” ujar dia.

Ia mengatakan sejak awal merasa tuduhan itu bermotif politik, dan menegaskan dirinya tidak melakukan kesalahan apapun, baik yang melanggar undang-undang Komisi Anti Korupsi Malaysia (SPRM) maupun undang-undang lainnya.

Pengadilan Tinggi Malaysia membebaskan mantan PM Malaysia Muhyiddin setelah majelis hakim

pengadilan tersebut mendapati keempat tuduhan tersebut kabur dan tidak berdasar karena tidak menyangkut secara rinci pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, hakim juga mengatakan Muhyiddin didakwa atas pelanggaran yang tidak diketahui hukumnya.

Muhyiddin selaku Perdana Menteri sekaligus Presiden Partai Bersatu saat itu, antara Maret 2020 hingga Agustus 2021, dituduh menggunakan kedudukannya untuk menerima suap dari Bukhary Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn

Bhd, Mamfor Sdn Bhd dan Azman Yusoff yang merupakan presiden dari sebuah organisasi kontraktor di Malaysia.

Jana Wibawa merupakan proyek yang menjadi program pembangunan khusus yang dilakukan oleh kontraktor Bumiputera di masa pandemi Covid-19 lalu.

Pendanaan proyek tersebut mengambil dari dana stimulus ekonomi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Malaysia kala itu terkait penanganan pandemi. (rol/pmr/ip)

Judul	Menanti Dukungan Lebih Nyata Lembaga Keuangan
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Mantan PM Malaysia bebas dari empat dakwaan suap
Halaman/URL	Pg14
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Neutral

Menanti Dukungan Lebih Nyata Lembaga Keuangan

Oleh Nida Sahara dan Prisma Ardianto

Lembaga keuangan menjadi ujung tombak dalam pencapaian target dan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, penting untuk memperdalam peran lembaga keuangan, khususnya industri perbankan, dalam menyokong pekerjaan besar bangsa ini dalam menggapai Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Lembaga intermediasi ini juga dituntut lebih nyata menyentuh masyarakat yang membutuhkan modal untuk kegiatan produktif.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, peran perbankan memang tidak pernah bisa luput. Bagaimana tidak, perbankan sebagai lembaga intermediasi tentu menjadi salah satu faktor penentu pergerakan ekonomi di seluruh sektor. Artinya, laju permintaan kredit perbankan baik kredit modal kerja dan investasi tentu akan mendorong daya beli, ekspansi usaha, hingga menggerakkan investasi. Di Indonesia, perbankan dalam negeri masih punya ruang yang sangat besar untuk mendorong ekspansi.

Pertumbuhan kredit perbankan sejatinya memang sudah menjadi fokus pemerintah saat ini. Karena itu, secara umum, dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu mendorong percepatan reformasi struktural, mengoptimalkan berbagai aset yang dimiliki, dan meningkatkan produktivitas nasional akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kita harus lihat REJIM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), pemerintah cita-cita mau jadi negara maju. Untuk itu, pertumbuhan kita minimal 6-7%, itu angka besar. Untuk mencapai ini butuh aparat yang tidak gampang," jelas ekonom senior dan Associate Lembaga Pengkajian Kebijakan di Indonesia (LPPK) Ryan Karyanto kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

Perbankan, menurut Ryan, secara khilaf adalah menjalankan fungsi intermediasi, mengumpul-kan dana dan mengalokasikannya ke dunia usaha melalui kredit. Khilaf bank pelat merah, ada fungsi tambahan sebagai *agent of development*, di mana untuk pembangunan yang *related* ke pemerintah butuh melibatkan bank BUMN.

Di sisi lain, peningkatan kelas dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diyakini menjadi salah satu cara agar visi Indonesia Emas 2045 terwujud. Dengan UMKM yang naik kelas, kesejahteraan masyarakat juga meningkat dan mengindikasikan perekonomian nasional yang maju. Direktur Bina Kecil dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRDI) Anam Sukiryo mengatakan, salah satu cara mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah terus menerus memberikan pemodal dan kemudahan UMKM secara berkelanjutan, sehingga pelaku usaha bisa naik kelas dan meningkatkan kapasitas bisnisnya.

"BRI sebagai lembaga keuangan nasional bisa berperan memberikan pemodal dan kemudahan secara berkelanjutan kepada UMKM supaya bisa terus bertumbuh. Dengan UMKM naik kelas, usaha bertumbuh, Indonesia bisa lebih sejahtera dan masuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045," ujar dia.

Bank pelat merah ini dibarengi fokus menjalankan kredit UMKM yang hingga kuartal I-2023 mencapai Rp 989,6 triliun atau 83,66% dari total penyaluran kredit BRI di kuartal yang sama.

Pembiayaan Berkelanjutan

Sementara itu, sebagai *agent of development*, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga berkomitmen terus berkontribusi dalam pembangunan nasional. Ini telah tercermin pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) perseroan yang hingga Juni 2023 mencapai Rp 59,8 triliun. Bank Mandiri juga membantu membukakan akses masyarakat menengah ke atas kepada layanan perbankan melalui dukungan 140 ribu Mandiri agen yang menjangkau 2,55 juta nasabah.

Bank Mandiri juga telah menerapkan tiga pilar implementasi yakni nilai lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*) atau ESG. Ketiga pilar ini, kata Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Jusandi menjadi target perseroan dalam mendukung ekosistem berkelanjutan. Hasilnya, sampai Juni 2023 Bank Mandiri telah menyalurkan portofolio berkelanjutan Rp 242 triliun. Dari portofolio itu, porsi khusus untuk portofolio hijau Rp 115 triliun atau 11,7% dari total kredit Bank Mandiri.

"Pembiayaan hijau atau *green financing* ini telah diadopsi untuk fokus ke sektor berkelanjutan, seperti sektor perkebunan yang telah tersertifikasi ISPO atau RSPO, energi baru, dan terdistribusi seperti pembangkit listrik bertenaga *hydropower*, transportasi, hingga ekosistem kendaraan listrik dari bus ke *EV*," jelas dia.

Selain dengan itu, Bank Mandiri konsisten mendukung transisi menuju Indonesia *net zero emission* 2060 yang menjadi komitmen masyarakat global, termasuk Indonesia. Untuk itu, Bank Mandiri baru saja merilis *digital carbon trading* yang memungkinkan *individual* melihat secara *real-time* jumlah karbon yang dihasilkan dan emisi yang dikurangi perseroan secara operasional.

Bank pelat merah lainnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pun turut mengalokasikan pembiayaan berkelanjutan, termasuk pembiayaan hijau Rp 179,4 triliun, atau 28,5% dari total kredit BNI. Dalam hal ini, BNI telah memperluas dukungan *enrich* gas rumah kaca. BNI juga mengkalakan dirinya sebagai pelopor dalam industri perbankan dalam mempromosikan kendaraan listrik dan ekosistemnya.

Selain bank pelat merah, bank swasta terbesar di Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) gencar menyalurkan kredit hijau, yakni Rp 71 triliun per Juni 2023. Presiden Direktur BCA Jajha Setiawanjaya mengatakan, penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan termasuk kredit hijau,



Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (Rp Triliun)

Kategori	2023		% (yoy)	
	Mai	Jun*	Mai 23	Jun 23 *
Kredit Modal Kerja (KMK)	2.982,5	3.008,2	8,1	8,5
a). Keuangan Fiat Ekst dan dan Perbankan	427,3	427,0	28,1	23,8
Perbankan, Perbankan Ketersediaan & Perbankan	238,9	239,4	8,7	10,1
Kredit Investasi (KI)	1.718,8	1.732,7	11,8	8,4
a). Industri Pengolahan	288,2	282,5	9,4	7,9
Perbankan, Perbankan Ketersediaan & Perbankan	281,1	282,3	6,4	6
Kredit Konsumsi (KK)	1.081,5	1.095,3	9,7	9,1
a). Kredit Pemilikan Rumah	694,7	693,6	7,4	10,1
Kredit Kerdasasan Berakut	126,7	127,1	38,1	17,8
Kredit Multiguna	1.089,6	1.104,6	92,1	7,6

*Data Sementara

Sumber: BPS

naik 6,9% (yoy) dengan total kredit Rp 181,2 triliun per Juni 2023.

Nilai itu, lanjut Jajha, berkontribusi 24,3% terhadap total portofolio pembiayaan BCA. Kredit hijau BCA itu tersalurkan untuk sumber daya alam dan penggunaan lahan berkelanjutan hingga kendaraan berkelanjutan. "BCA konsisten mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik," kata Jajha.

Potensi Asuransi

Di sisi lain, potensi pembiayaan jangka panjang masih terbuka lebar untuk dihipunkan sektor industri perasuransian. Sektor ini secara kumulatif telah tumbuh dalam 9,5 tahun belakangan, tetapi belum cukup optimal.

Mengacu statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total investasi di sektor perasuransian mencapai Rp 1.471,43 triliun per Juni 2023, tumbuh 126,94% dibandingkan akhir 2013 yang masih Rp 538,45 triliun. Artinya, investasi perasuransian tumbuh sekitar 16% per tahunnya.

Jika ditilik setiap sektor turunan di industri perasuransian menyumbang kontribusi yang variatif. Asuransi sosial oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memegang peranan penting dengan total

investasi mencapai Rp 703,12 triliun hingga Juni 2023. Bagian langsung dari pemerintah yakni asuransi wajib oleh Asabri, Taspen, dan Jasa Raharja juga demikian, dengan kontribusi Rp 135,66 triliun.

Sementara di sektor perasuransian komersial, asuransi jiwa menyumbang Rp 516,74 triliun, asuransi umum Rp 97,04 triliun, dan reasuransi Rp 18,87 triliun per Juni 2023. Ketiga sektor ini bahkan mencatat penetrasi asuransi kurang dari 5%. Padahal, potensi dari industri ini sangat besar.

Kepala Birostatistik Pengasas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomo mengatakan, Indonesia memiliki 278 juta penduduk dan tentu membutuhkan proteksi asuransi. Jumlah penduduk itu adalah lebih dari 10% dari total penduduk dunia. Potensi besar sektor perasuransian untuk mendukung perekonomian nasional ke depan.

"Hal ini terbukti dari data statistik yang menunjukkan bahwa negara-negara maju, pertumbuhan ekonominya terus didukung dari sektor perasuransian. Jadi, ada korelasi yang tinggi antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan industri perasuransian," ungkap Ogi di Jakarta, baru-baru ini.

Sebagai ilustrasi, kata dia, tingkat penetrasi asuransi komersial di negara-negara anggota kelompok G20 pada 2022 di level 9,44%, sementara Indonesia di level 1,6%. Negeri ini bahkan disebut kalah telak dengan Thailand, Malaysia, dan India.

Guna merespons sederet tantangan di sektor perasuransian, OJK memiliki empat alat kebijakan yakni penguatan pemodal, tata kelola dan manajemen risiko, penguatan ekosistem, serta adopsi standar internasional. OJK pun melakukan penguatan penguatan dengan pemanfaatan teknologi.

Masih Konservatif

Ekonom Celos Bhima Yudhistira mengatakan, selain perbaikan, ruang pemanfaatan dana pensiun dan asuransi untuk menbantu pembangunan dan berbagai sektor ekonomi masih cukup besar. "Untuk pemanfaatan dana pensiun spesifik ke sektor usaha terdapat penempatan di saham, tabung, obligasi konvensional, dan berbagai instrumen KIK dan ORE. Memang saat ini angkanya masih kecil, tapi potensi proyek swasta dibantu melalui berbagai instrumen penempatan dana pensiun terbuka lebar," ujar dia.

Menurut Bhima, masih dari pola penempatan portofolio dana pensiun dan asuransi yang terbelah cukup konservatif, sehingga cenderung pembiayaan benefit tidak langsung melalui instrumen SBN (*low risk*). Dengan begitu, ruang untuk pembiayaan langsung ke proyek menjadi terbatas.

"Mungkin perlu juga adanya manajemen risiko yang lebih proporsional sehingga imbal hasil bisa terjaga. Buklitas terjaga, sekaligus porsi pembiayaan langsungnya lebih besar," jelas dia.

Ke depan Bhima berharap, insentif fiskal bisa berupa pengurangan berbagai pajak kepada industri dana pensiun dan asuransi agar lebih banyak memberi pembiayaan, kemudian juga sorotbal berupa relaksasi manajemen risiko. (B)

Judul	Palsukan Izin Tambang, Ismail Thomas Didersangkakan Kejagung
Nama Media	Banten Pos
Newstrend	Anggota DPR Ismail Thomas ditetapkan tersangka kasus tambang
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Positive

Palsukan Izin Tambang, Ismail Thomas Didersangkakan Kejagung

JAKARTA, BANPOS - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anggota Komisi I DPR Ismail Thomas sebagai tersangka korupsi pemalsuan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Korps Adhyaksa langsung menahan politisi PDI Perjuangan tersebut.

"Tim penyidik Jampidsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial IT (Ismail Thomas) anggota Komisi I DPR RI atau bupati Kutai Barat 2006-2016," ujar

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Mantan Bupati Kutai Barat itu diduga membuat dokumen palsu untuk memenangkan perkara di pengadilan. Ketut menjelaskan, Kejagung sebelumnya menyita tambang yang merupakan aset dari PT Gunung Bara Utama, anak perusahaan dari PT Trada Alam Minerba.

PT Trada Alam merupakan milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat.

Namun, PT Sendawar Jaya mengklaim sebagai pemegang izin sah

lahan tambang tersebut. Mereka mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2022.

Dalam gugatan tersebut, Kejagung terdaftar sebagai turut tergugat. PT Sendawar Jaya memegang Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) batu bara nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008.

Kemudian Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008, dan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/K.781c/

2008, Tanggal 9 September 2008.

Pengadilan kemudian memutuskan PT Sendawar Jaya yang berhak menguasai tambang tersebut.

Kejagung yang terlanjur menyita lahan tersebut sebagai aset PT Gunung Bara Utama, harus mengembalikannya kepada PT Sendawar Jaya. "Kita dikalahkan, ketika kita cek, ternyata dokumen semuanya palsu," tutur Ketut.

Ismail ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba cabang Kejaksaan. Dia dijerat Pasal 9 Undang-undang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.(ANT/IRMD)

Judul	Korupsi Dapen Diperiksa Kejagung Bulan Depan
Nama Media	Pos Kota
Newstrend	Kasus Korupsi PT Jiwasraya
Halaman/URL	Pg9
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Positive



Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Sekretariat Kabinet

Korupsi Dapen Diperiksa Kejagung Bulan Depan

JAKARTA, (Poskota) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada September 2023.

Sekadar informasi, laporan perkara dugaan korupsi dana investasi pensiunan perseroan negara itu harus diserahkan ke Kejagung pada Juli 2023 lalu. Tetapi, audit

yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum selesai.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan audit dapen perusahaan pelat merah ini baru rampung pada September mendatang. Setelah itu, kata dia, akan dilaporkan ke Kejagung.

"Memang tadinya kita mau akhir Juli (2023), namun setelah BPKP dia bilang September. Ya udah

kita enggak bisa dorong," kata Erick dalam keterangannya, Selasa, (15/8).

Lebih lanjut, Erick menjelaskan pengaduan tindak korupsi dapen BUMN harus dilakukan. Tujuannya agar dana pensiun karyawan ini bebas dari para mafia atau koruptor.

Berkaca dari kasus PT Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Taspen (Persero), kata Erick, bersih-bersih dapen BUMN penting dilakukan.

Menurut Erick, ada dua

akar masalah dana pensiun BUMN yakni tindak pidana korupsi dan mismanajemen alias salah kelola. Kata dia, persoalan tersebut ditemukan setelah pihaknya melakukan pemetaan.

"Kita lihat juga dana pensiun sudah dipetakan dan selesai dan diaudit BPKP. Setelah diaudit kita bisa petakan mana yang fraud, korupsi, dan mana yang mismanajemen. Ada dua nih jangan salah," ujarnya. **(Wanto/yh)**

Judul	Terkait Kasus Jiwasraya, Anggota DPR Ismail Thomas Jadi Tersangka
Nama Media	Kompas
Newstrend	Anggota DPR Ismail Thomas ditetapkan tersangka kasus tambang
Halaman/URL	Pg19
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Negative

PEMALSUAN DOKUMEN PERSIDANGAN

Terkait Kasus Jiwasraya, Anggota DPR Ismail Thomas Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS — Kejaksaan Agung menetapkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ismail Thomas, sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen persidangan. Kasus itu terkait penyitaan aset terpidana Heru Hidayat dalam kasus Asuransi Jiwasraya dan divonis seumur hidup.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam jumpa pers, Selasa (15/8/2023), di Jakarta mengatakan, penyidik menetapkan Ismail Thomas, yang juga Bupati Kutai Barat periode 2006-2016, sebagai tersangka. Ia terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya.

"Peran tersangka IT adalah bersama-sama membuat dokumen palsu terkait perizinan pertambangan," ujar Ketut.

Dokumen tersebut diduga untuk mengambil alih usaha pertambangan sebagai bukti administrasi seolah-olah PT Sendawar Jaya merupakan perusahaan yang memiliki izin sah. Menurut Ketut, dokumen digunakan untuk persidangan.

Ismail, lanjut Ketut, bukan pelaku satu-satunya. Ada pihak lain yang ikut dalam pemalsuan dokumen. Terkait jenis dokumen yang dipalsukan Ismail,

Ketut menolak menjawab karena masih penyidikan. "Yang bersangkutan diduga memalsukan dokumen tahun 2021, statusnya anggota DPR," katanya.

Pasal yang disangkakan terhadap Ismail adalah Pasal 9 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Ismail langsung ditahan di Rumah Tahanan Kejagung.

Terkait Heru Hidayat

Ketut membenarkan, kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan tersangka Ismail tersebut terkait aset yang disita dari terpidana Heru Hidayat dalam kasus pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam kasus tersebut, Kejagung menyita tambang batubara PT Gunung Bara Utama seluas 5.350 hektar.

Tambang dilelang Juni lalu dan terjual Rp 1,94 triliun. Hasil lelang direncanakan dimasukkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Atas lelang tersebut, muncul gugatan perduta dari beberapa pihak, salah satunya PT Sendawar Jaya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diputuskan aset tersebut diserahkan kepada PT Sendawar Jaya. Namun, di tingkat kedua, pengadilan tinggi menganulir putusan



Tersangka Ismail Thomas digiring menuju kendaraan tahanan dari Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/8/2023). Tersangka Ismail Thomas yang merupakan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya.

pengadilan dengan memenangkan Kejagung.

"Di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, di tahap selanjutnya ini masih proses peradilan dan kita temukan yang bersangkutan salah satu orang yang membuat dokumen palsu," ujar Ketut.

Tak mudah diungkap

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah

Mada, Zaenur Rohman, menyampaikan apresiasi atas upaya Kejagung memulihkan kerugian keuangan negara dalam kasus yang merugikan negara Rp 16,8 triliun. Upaya itu dinilai tak mudah karena uang terkait kasus mengalir ke mana-mana, termasuk bisnis.

Menurut Zaenur, terkait jeratan Pasal 9 UU Tipikor tentang pemalsuan, dugaan pidana tersebut tentu tak lepas dari

konteks dan motif pemalsuan. Pertanyaannya, apakah yang bersangkutan menerima sesuatu atau gratifikasi terkait tindakannya atau tidak. Tak tertutup kemungkinan yang bersangkutan terkait aliran dana atau turut menerima dalam korupsi Asuransi Jiwasraya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi masih belum merespons. (NAD)

Judul	Power Lunch - H1-2023, Premi Industri Asuransi Terkontraksi 4,74% (YOY)
Nama Media	CNBC INDONESIA
Newstrend	Pendapatan premi sektor asuransi
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.08/00129dfbc07eb2effcdd60ec42321855eb1fcfa1f30ebc1d81cda94ad3b675b8
Tanggal Berita	2023-08-15
Sentimen	Positive



Industria asuransi masih mengalami tekanan di sepanjang paruh pertama tahun 2023 ini. Pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan Juni 2023 terkontraksi 4,74 persen secara tahunan menjadi hanya 150,08 triliun rupiah. Pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa melanjutkan trend penurunan sebesar 9,94 persen secara tahunan dengan nilai sebesar 86,02 triliun per Juni 2023 didorong oleh normalisasi premi di lini Usaha Paidi. Di sisi lain, akumulasi premi, asuransi umum, tumbuh positif 4,02 persen secara tahunan, menjadi 64,06 triliun rupiah.

Judul	Power Lunch - Warga RI Belum Merdeka Finansial Ini Solusi dari Industri Asuransi
Nama Media	CNBC INDONESIA
Newstrend	Kinerja literasi keuangan dan inklusi keuangan
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.08/5ec9d875de5bd33f46236303ecf3a93ba11c6a786888ee4ea2cd3692ed6c55cb
Tanggal Berita	2023-08-15
Sentimen	Positive



Dan untuk mengulas kondisi kinerja dan juga untuk membedah gap literasi keuangan dan inklusi keuangan yang masih cukup besar lantas bagaimana dampaknya terhadap bisnis perasuransian dan bagaimana solusi dari para pelaku bisnis. Kita melihat survei tadi nasional ini masih ada gap antara literasi dan juga inklusi keuangan Indonesia secara umum yang masih cukup besar 35,4 Pak Nah untuk di industri perasuransinya 30,46% tapi tingkat inklusinya sebesar 16,63% artinya ini juga ada gap tanggapan dari Bapak dan Ibu seperti apa.

" sampaikan di industri jasa keuangan 35,4% Artinya bahwa masyarakat itu belum paham dan terampil benar dalam menggunakan produk dan jasa layanan yang diberi keuangan yang dimilikinya Jadi mungkin ada sesuatu kondisi yang mengharuskan dia menggunakan inklusinya tinggi tetapi mungkin belum terliterasi secara baik." Sebut Direktur Bisnis BNI Life Neny Asriani

Judul	Kompas Pagi - Terkait Kasus Jiwasraya, Anggota DPR Ismail Thomas Jadi Tersangka
Nama Media	Kompas TV
Newstrend	Anggota DPR Ismail Thomas ditetapkan tersangka kasus tambang
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.08/1cffd594039c3f90205ff1d12aaacc9ef4b59be284d136a7d96ad378b68ebef8
Tanggal Berita	2023-08-16
Sentimen	Positive



Di bagian bawahnya ada informasi lainnya, ini terkait dengan pemalsuan dokumen persidangan, kasus Jiwas Raya, Anggota DPR Ismail Thomas, jadi tersangka. Ini Anggota Komisi 1 DPR Ismail Thomas dari Faksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jadi tersangka. Ismail Thomas menjadi tersangka kasus jugaan pemalsuan dokumen persidangan. Ismail Thomas juga terlibat perkara dugaan korupsi penerbitan dokumen perizinan pertambangan, BT Sanda War Jaya. saat menjadi Bupati Kutai Barat Periode 2006 hingga 2016. Yang bersangkutan juga turut diduga ini memasukkan dokumen pada tahun 2021 saat menjadi anggota DPR.

Judul	Fadjar Gunawan: Panin Dai-ichi Life Komitmen Berikan Perlindungan Inovatif
Nama Media	rm.id
Newstrend	Komitmen Panin Dai-ichi Life Berikan Perlindungan Inovatif
Halaman/URL	https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/184039/bayar-klaim-rp-25-miliar-fadjar-gunawan-panin-daiichi-life-komitmen-berikan-perlindungan-inovatif
Tanggal Berita	2023-08-15
Sentimen	Positive

Bayar Klaim Rp 2,5 Miliar

Fadjar Gunawan: Panin Dai-ichi Life Komitmen Berikan Perlindungan Inovatif

Reporter & Editor :
OKTAVIAN SURYA DEWANGGA

Ekonomi Bisnis



Selasa, 15 Agustus 2023 11:11 WIB



RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Direktur (Presdir) PT Panin Dai-ichi Life, **Fadjar Gunawan**, perusahaan Asuransi yang berkantor di Panin Life Center 6th Floor Jalan Letjend S Parman Kav 91, Jakarta Barat, DKI Jakarta, mengungkapkan, pihaknya kembali membayarkan klaim tutup usia sebesar Rp 2,5 miliar kepada perwakilan ahli waris nasabah bancassurance di Semarang, Jawa Tengah.

Klaim ini merupakan salah satu manfaat dari produk asuransi jiwa **Panin Smart Secure Wealth** dan **Panin Premier Protection** yang dipasarkan melalui jalur pemasaran Bancassurance Panin Bank.

Judul	TAA AAJI ke-36: Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri Bicara Leadership di Hadapan Ratusan Agen Asuransi Jiwa
Nama Media	indonesiasatu.co
Newstrend	TAA AAJI ke-36
Halaman/URL	https://indonesiasatu.co/detail/taa-aaji-ke-36--pelatih-timnas-indonesia-indra-sjafri-bicara-leadership-di-hadapan-ratusan-agen-asuransi-jiwa
Tanggal Berita	2023-08-15
Sentimen	Positive

TAA AAJI ke-36: Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri Bicara Leadership di Hadapan Ratusan Agen Asuransi Jiwa

15 Aug 2023 12:53



SEMARANG, IndoneiaSatu.co - Pandanaran Grand Ballroom, Semarang ini diikuti oleh kurang lebih 600 peserta dari berbagai perusahaan asuransi jiwa.

Ketua Panitia TAA AAJI ke-36, Arry Wibowo mengatakan bahwa tahun ini panitia mengangkat tema "Kemilau Bintang" karena AAJI ingin merayakan keberhasilan para tenaga pemasar dengan prestasi dan kontribusi mereka yang cemerlang layaknya kemilau bintang.

"Kami berharap prestasi dan kontribusi para tenaga pemasar terbaik tersebut dapat menerangi industri yang kita cintai dan menjadi sumber inspirasi lagi seluruh tenaga pemasar asuransi jiwa di Indonesia," jelas Arry.

Acara yang berlangsung mulai dari siang hingga sore hari tersebut menghadirkan dua sosok inspiratif yaitu seorang content creator, Agung Karmalogy serta seorang pelatih sepak bola Timnas Indonesia, Indra Sjafri.

Judul	Astra Financial Raih Capaian Positif di GIIAS 2023
Nama Media	kontan.co.id
Newstrend	Capaian Positif Astra Financial di GIIAS 2023
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/astra-financial-raih-capaian-positif-di-giias-2023
Tanggal Berita	2023-08-15
Sentimen	Positive

Astra Financial Raih Capaian Positif di GIIAS 2023

Selasa, 15 Agustus 2023 / 13:43 WIB



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lini bisnis pembiayaan kendaraan dan asuransi Astra Financial mencatatkan pencapaian positif dalam penyelenggaraan pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Project Director Astra Financial di GIIAS 2023 Tan Chian Hok mengatakan transaksi untuk roda empat yang dicatatkan Astra Financial melalui Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Finance (TAF) sebesar Rp 700,6 miliar dari 1.814 unit selama empat hari penyelenggaraan GIIAS 2023 mulai 10 Agustus 2023 hingga 13 Agustus 2023.